



# RENCANA STRATEGIS 2021-2026



**PEMERINTAH KOTA CILEGON  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Cilegon Tahun 2021-2026 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Renstra ini merupakan Penjabaran dari RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026 sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026.

Didalam Dokumen Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu Perencanaan yang Terpadu yang berorientasi pada hasil.

Penyusunan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang serta dengan besar harapan Renstra ini akan menjadi arah, acuan dan Motivasi Peningkatan kinerja bagi pelaksana tugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon

Cilegon, 26 September 2021  
Kepala Bappeda Kota Cilegon,

  
**Hj. BEATRIE NOVIANA, SH, M.Si**  
NIP. 19611130 198603 2 007



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 LATAR BELAKANG.....	1
I.2 LANDASAN HUKUM.....	3
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	5
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
II.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	8
II.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH .....	14
II.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	17
II.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	24
III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	24
III.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	25
III.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI.....	26
III.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	28
III.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	52
IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH.....	52
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	54
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	56
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	71
BAB VIII PENUTUP .....	73





## DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin .....	14
Tabel 2 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	14
Tabel 2 3 Jumlah Pegawai berdasarkan Status.....	14
Tabel 2 4 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan .....	15
Tabel 2 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang.....	15
Tabel 2 6 Daftar Sarana Dan Prasarana tahun 2020 .....	15
Tabel 2 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Cilegon .....	18
Tabel 2 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Cilegon .....	20
Tabel 3 1 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah .....	31
Tabel 3 2 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah .....	35
Tabel 3 3 Hasil Telaahan Pengembangan Kawasan Strategis .....	38
Tabel 3 4 Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Matriks Indikasi Program RTRW Kota Cilegon 2020-2040 .....	39
Tabel 3 5 Matriks Sinkronisasi Tujuan RPJMD 2021-2026 dan Tujuan TPB .....	47
Tabel 3 6 Isu Strategis dalam perencanaan pembangunan .....	49
Tabel 4 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	52
Tabel 5 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....	54
Tabel 6 1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan .....	56
Tabel 6 2 Program Prioritas Bappeda.....	60
Tabel 7 1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	71
Tabel 7 2 Definisi Operasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	72



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan .....	2
Gambar 2 Bagan Susunan Organisasi Bappeda Kota Cilegon.....	10



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Cilegon Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Bappeda Kota Cilegon untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026 sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam penyusunan Renstra tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam system perencanaan pembangunan yang dianut selama ini.

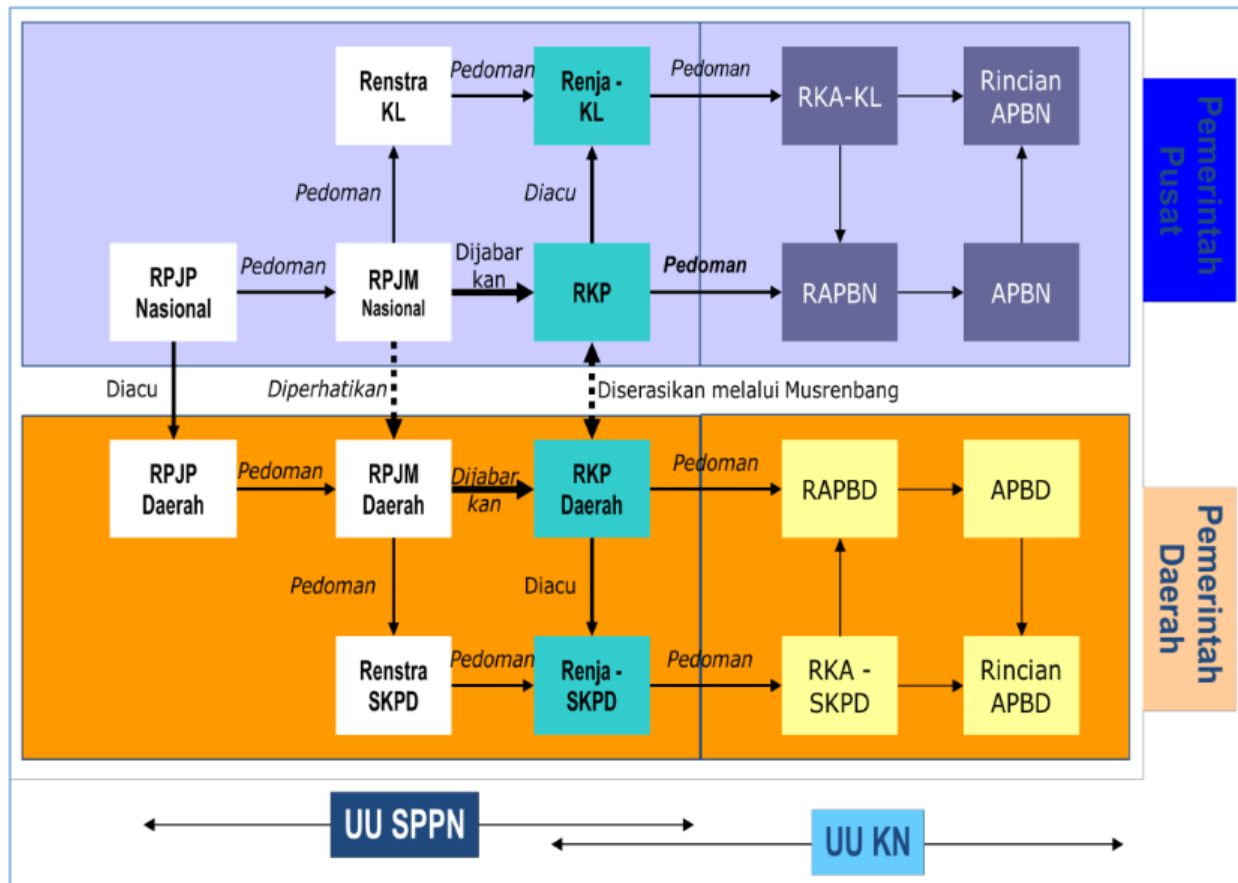
Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Cilegon, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah.

Dengan tersedianya dokumen Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.



Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

*Gambar 1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan*



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Bappeda Kota Cilegon yang berpedoman pada RPJMD Kota Cilegon dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Cilegon. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Cilegon dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodir dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



Dokumen Renstra ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi Kebijakan, Program dan kegiatan sebagai media akuntabilitas kepada atasan dan masyarakat melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap akhir tahun.

## **I.2 LANDASAN HUKUM**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-





- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10);
  10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 59).
  11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040;
  12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 91);
  13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 7);



14. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Walikota Cilegon Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

### **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan sekaligus Pedoman/acuan secara umum dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon.

Tujuan Penyusunan dokumen Renstra oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Sebagai landasan atau Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon.
2. Tersedia alat awal untuk mengukur pencapaian kinerja yang akan digunakan pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Menjadi Pedoman setiap Pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi; dan
4. Sebagai alat untuk merumuskan mekanisme pengukuran dan menyusun rencana kerja serta evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon.



## **I.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Renstra Bappeda Kota Cilegon Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Bappeda Kota Cilegon Tahun 2021-2026.

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi gambaran tugas dan fungsi serta struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon.

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Berisi tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026.

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisi Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon sebagai rumusan perencanaan yang berpedoman pada RPJMD Kota Cilegon 2021-2026.

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.



## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Mengemukakan secara eksplisit indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII. PENUTUP**

Menyajikan tentang kesimpulan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tingkat Tujuan dan Sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan, serta program transisi untuk mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah dan kaidah pelaksanaan.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **II.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Sebagaimana telah dituangkan di dalam Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2017, Tugas Bappeda Kota Cilegon adalah Membantu Wali Kota Cilegon dalam merencanakan perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam mencapai tugasnya tersebut, Bappeda kota Cilegon menjalankan fungsi :

1. Analisa dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara holistiktematik, integratif dan spasia;
2. penyiapan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, RTRW, dan RKPD;
3. mensinergikan dan mengharmonisasikan kegiatan Kementerian/Lembaga, dan Provinsi di Daerah;
4. mensinergikan dan mengharmonisasikan kegiatan Perangkat Daerah;
5. melaksanakan kesepakatan dengan DPRD terkait dengan dokumen perencanaan;
6. mengendalikan dan memonitor pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
7. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
8. melaksanakan penelitian dan pengembangan melalui kegiatan penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian;
9. melaksanakan analisis data statistic serta informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
10. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan pembangunan daerah;
11. penyiapan dan penyusunan KU-APBD, KU-PAPBD, PPAS, dan PPAS Perubahan;





12. penyusunan norma, standar, dan prosedur kegiatan perencanaan pembangunan dengan mengkonsultasikan kepada Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kota Cilegon;
13. pengoordinasian penelitian dan mengadakan kerja sama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
14. penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya;
15. pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta penyusunan statistic perkembangan penelitian dan pengembangannya;
16. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
17. pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan RKPD; dan
18. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi.

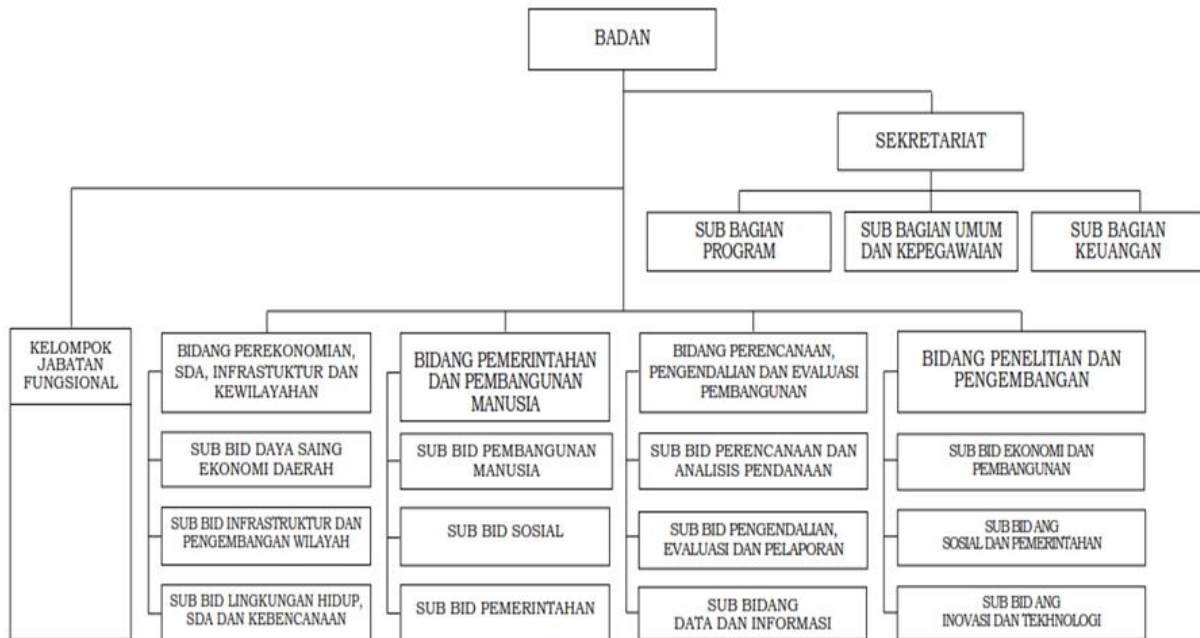
Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda Kota Cilegon, maka kegiatan perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematis, produknya dirumuskan dengan sistematis dan didasarkan pada pemikiran logis dan objektif. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (actionplan).

Karena itu perencanaan pembangunan diharapkan bersifat implementatif(dapat dilaksanakan) dan aplikatif(dapat diterapkan ). Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data akurat, baik yang dilakukan secara konseptual, dokumentasi maupun eksperimental.



Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kota Cilegon dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon dipimpin oleh pejabat eselon II b dengan susunan organisasi sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut :

*Gambar 2 Bagan Susunan Organisasi Bappeda Kota Cilegon*



### **Kepala Badan:**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas urusan fungsi Badan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud perencanaan pembangunan di Kota Cilegon yang optimal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan koordinasi tugas lingkup Dinas pada Asisten Sekda sesuai bidang tugasnya; dan



- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretariat:**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas lingkup Sub Bagian Program, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan, baik pelayanan teknis maupun administratif dan koordinasi tugas Bidang-Bidang secara terpadu sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi memimpin :

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda Kota Cilegon;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda Kota Cilegon;
- i. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



### **Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan:**

Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Daya Saing Ekonomi Daerah, Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Sub Bidang Lingkungan Hidup, SDA dan Kebencanaan, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia:**

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia, Sub Bidang Sosial dan Sub Bidang Pemerintahan, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;



- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah:**

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Pendanaan, Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bidang Data dan Informasi, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Penelitian dan Pengembangan:**

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan dan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran





pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## II.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber daya Bappeda Cilegon terdiri dari Kepegawaian dan Aset/modal Susunan kepegawaian Bappeda Kota Cilegon dapat digambarkan dalam tabel-tabel dibawah ini:

*Tabel 2 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin*

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	LAKI – LAKI	58 Orang
2	PEREMPUAN	28 Orang
	TOTAL	86 Orang

*Tabel 2 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan*

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	29 Orang
2	S1	26 Orang
3	D3	10 Orang
4	SMA	21 Orang
	TOTAL	86 Orang

*Tabel 2 3 Jumlah Pegawai berdasarkan Status*



NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	PNS	50 Orang
2	CPNS	3 Orang
3	TKK	11 Orang
4	THL	22 Orang
	TOTAL	86 Orang

*Tabel 2 4 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan*

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Esselon II.b	1 Orang
2	Esselon III.a	1 Orang
3	Esselon III.b	4 Orang
4	Esselon IV.a	15 Orang
5	PERENCANA MADYA	2 Orang
6	PERENCANA MUDA	2 Orang
7	PERENCANA PERTAMA	3 Orang
8	PELAKSANA	58 Orang

*Tabel 2 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang*

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	II.b	1 Orang
2	II.d	4 Orang
3	III.a	5 Orang
4	III.b	8 Orang
5	III.c	15 Orang
6	III.d	7 Orang
7	IV.a	11 Orang
8	IV.b	1 Orang
9	IV.c	1 Orang
	JUMLAH	53 Orang

*Tabel 2 6 Daftar Sarana Dan Prasarana tahun 2020*



NO	SPESIFIKASI BARANG	JUMLAH	KET		
			B	KB	RB
1	Meja Biro	107	52	50	5
2	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1		
3	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	5		
4	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	15		
5	Kursi Kerja	55	55		
6	Kursi Direktur	3	3		
7	Kursi Tamu	11	6	1	4
8	Kursi Putar	83	27	3	53
9	Meja Rapat	8	7		1
10	Kursi Rapat	274	264		10
11	Sofa	10	9		1
12	Lemari Besi	50	47	2	1
13	Lemari Kaca	5	5		
14	Lemari Kayu	46	29	2	15
15	Brangkas	4	1		3
16	Rak Besi / Metal	8	8		
17	Alat Penghancur Kertas	4	4		
18	Papan Nama Instansi	1	1		
19	Papan Pengumuman	1	1		
20	Whita Board	18	18		
21	Karpet	1	1		
22	Handycam	6	4	1	1
23	Kamera	18	13	4	1
24	Note Book	12	8	1	3
25	PC	32	17	2	13
26	Laptop	60	40	6	14
27	Printer	61	31	11	19
28	Proyektor + Attachment	17	10		7
29	Pesawat Telpon	2			2
30	Faximile	3	1		2
31	CCTV	16	16		
32	Scanner	19	19		
33	Refrigerator	7	6		1
34	Fotocopy	2	1		1
35	Dispenser	10	4	4	2
36	TV	7	3		4
37	Loud Speaker	1	1		
38	AC	60	45	1	14
39	Mesin Tik	9	7		2
40	Filling Kabinet	79	69	10	
41	R4	15	15		
42	R2	32	23	4	5
43	Drone	1		1	
44	Sound System	4	4		



<b>45</b>	Keyboard	1	1		
<b>46</b>	Mesin Potong Rumput	2	2		

### II.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan dan merencanakan berbagai kebijakan dan program yang tepat, dengan mengoptimalkan Sumber daya dan pelibatan segenap pelaku pembangunan. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang mendasari pentingnya perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

1. Perencanaan pembangunan daerah sangat dibutuhkan sebagai salah satu instrument untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan pembangunan daerah sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang hingga kini masih dihadapi Pemerintah Daerah;
3. Ketersediaan Sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunans sangat terbatas, sehingga perencanaan sangat diperlukan untuk menentukan prioritas pembangunan yang diperlukan, tujuan dan sasaran kinerja yang hendak dicapai, mengalokasikan Sumberdaya (anggaran, Sumberdaya manusia, dan lainnya) secara tepat, efektif, efisien, realistik dan konsisten.

Perencanaan pembangunan daerah secara strategis semakin diperlukan guna sinkronisasi dan sinergi kegiatan pusat dan daerah, serta antar daerah. Makna daerah dalam ketentuan tersebut, terbagi dalam tingkatan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah administratif Pemerintah Provinsi, diharapkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah mempedomani Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi, sehingga keterpaduan rencana, anggaran dan Sumber Datanya dapat dioptimalkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja renstra perubahan Bappeda Kota Cilegon Tahun 2016-2021 kinerja Pelayanan dalam menjalankan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:



Tabel 2 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Cilegon

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	NSPK	IKK	Target	Indikator Lainnya	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan		Nilai LAKIP Perangkat Daerah Tingkat Maturitas SPIP Tingkat Kinerja Pegawai (Rata-rata Nilai SKP)			2	2	3	3	4	2	3	3	4	4	100	100	100	100	100			
						3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100			
						82	82	84	86	88	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
						82	82	84	85	90	82	82	84	90	90	100	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah		Ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan yang tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
						Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar		Persentase ketersediaan data dan informasi sectoral	75	75	80	85	90	75	75	80	85	83.40	100	100	100	100	92.67
								Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	75	75	80	85	90	75	75	80	85	87.65	100	100	100	100	97.38
								Tingkat Disiplin Aparatur Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan Cash Budget (Anggaran Kas)	80	80	80	80	80	80	80	80	78.6	100	100	100	100	98.25	
					75	75	80	85	85	75	75	80	85	84.6	100	100	100	100	94				
	Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah					Tingkat tata kelola proses/tahapan/mekanisme perencanaan, pengendalian dan evaluasi jangka panjang, menengah dan tahunan yang komprehensif, partisipatif, handal, responsif dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	91.67	100	100	100	100	91.67			
						Persentase kesesuaian antara muatan perencanaan tingkat kota dengan dokumen perencanaan tingkat propinsi dan tingkat nasional (pusat)	80	80	80	80	80	80	80	80	76	100	100	100	100	95			
						Persentase jumlah usulan musrenbangkel yang diakomodir dalam RKPD (Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui	50	50	50	50	50	50	50	50	50	41.88	100	100	100	100	83.75		



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	NSPK	IKK	Target	Indikator Lainnya	2016	Target Renstra PD Tahun				Realisasi PD Tahun					Rasio Capaian Pada tahun				
1	2	3	4		5	6	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
					Musrenbang yang tercakup dalam dokumen penganggaran															
	Meningkatkan kualitas koordinasi antar sektoral pada seluruh tahapan perencanaan dan evaluasi di bidang pembangunan sosial dan budaya				Tingkat efektifitas koordinasi perencanaan dan evaluasi program pada SKPD di bawah koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	66.9	100	100	100	100	74.33
					Tingkat ketersediaan analisis data sektoral di bawah koordinasi bidang Sosial Pemerintahan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	82	100	100	100	100	91.67
	Meningkatkan kualitas koordinasi antar sektor pada seluruh tahapan perencanaan dan evaluasi di bidang ekonomi dan infrastruktur				Persentase substansi dokumen Perencanaan Tata Ruang yang ditindaklanjuti	80	80	80	85	90	80	80	80	85	90	100	100	100	100	100
					Tingkat efektifitas koordinasi perencanaan dan evaluasi program pada SKPD di bawah koordinasi Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan	80	80	80	85	90	80	80	80	85	68.7	100	100	100	100	76.33
					Tingkat ketersediaan analisis data sektoral di bawah koordinasi bidang perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan	80	80	80	85	90	80	80	80	85	80.7	100	100	100	100	89.67
	Meningkatkan inovasi daerah melalui penelitian dan pengembangan serta kerjasama dengan lembaga penelitian atau instansi lainnya				Persentase cakupan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100
					Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100



*Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Cilegon*



Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-ata Pertumbuhan Anggaran Realisasi	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	4.169.507.100	4.636.144.400	5.353.153.000	5.658.393.183	4.997.489.266	3.640.062.263	4.247.086.141	4.688.889.325	5.068.369.099	4.285.177.633	87.30	91.6	87.5	89.5	85.7	5.17	4.93
Program Perencanaan Pembangunan , Pengendalian dan Evaluasi	NA	1.664.700.000	2.944.466.000	2.200.000.000	3.613.178.700	NA	1.630.487.900	2.557.358.100	2.134.736.400	3.235.961.175	NA	97.9	86.8	97.0	89.5	38.61	30.63
Program Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	2.502.534.000	NA	NA	NA	NA	2.440.210.000	NA	NA	NA	NA	97.51	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah	3.185.031.000	NA	NA	NA	NA	2.887.641.150	NA	NA	NA	NA	90.66	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan	NA	1.112.250.000	1.660.384.000	1.347.350.000	1.187.100.000	NA	1.041.046.400	1.598.297.000	1.278.971.900	1.146.196.800	NA	93.6	96.2	94.9	96.5	6.17	7.72
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan pemerintahan	1.332.500.000	NA	NA	NA	NA	1.273.117.000	NA	NA	NA	NA	95.54	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA	NA	1.340.000.000	1.336.810.000	1.155.060.000	804.237.500	NA	1.173.001.000	1.169.306.480	1.044.085.100	659.272.000	NA	87.5	87.4	90.3	81.9	-14.73	-15.96
Infrastruktur dan Kewilayahan	1.100.000.000	NA	NA	NA	NA	1.003.817.000	NA	NA	NA	NA	91.26	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.645.400.000	NA	NA	NA	NA	1.537.087.000	NA	NA	NA	NA	93.42	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	NA	1.634.375.000	1.589.585.000	1.650.000.000	1.724.243.000	NA	1.586.528.746	1.570.615.900	1.633.852.950	1.669.467.000	NA	97.0	98.8	99.0	96.8	1.85	1.73
Program Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah																	





## **II.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Bappeda kota Cilegon merupakan analisis terhadap Kinerja Pelayan Bappeda kota Cilegon. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda kota Cilegon

- **Tantangan**

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
2. Belum beragamnya sumber data yang digunakan dalam membuat dokumen perencanaan
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- **Peluang**

1. Sarana dan prasarana kerja yang memadai;
2. Tersedianya dukungan anggaran
3. Sudah tersedianya system informasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi





### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

#### **III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi serta penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa permasalahan pelayanan Bappeda Kota Cilegon yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Tingkat akurasi dan ketersediaan data sektoral masih perlu ditingkatkan dan diintegrasikan dalam pengelolaan yang terpadu agar menjadi input yang tepat dalam penyusunan perencanaan;
2. Integrasi perencanaan dan penganggaran melalui penggunaan Sistem Aplikasi masih belum optimal;
3. Masih belum optimalnya ketersediaan data sektoral pembangunan daerah sebagai input/instrumen utama dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah;
4. Kualitas dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan dari sisi ketepatan, keterukuran dan konsistensi;
5. Pemahaman SDM perencana di OPD terhadap prinsip-prinsip perencanaan yang masih harus ditingkatkan, khususnya terkait dengan substansi dokumen perencanaan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



### III.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kota Cilegon periode 2021-2026 adalah “ **Mewujudkan Cilegon Baru Modern Dan Bermartabat** “ . Misi merupakan bagian dari proses menuju cita-cita. Misi adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi.

Dalam menjalankan misi tidak terlepas dari pengaruh kondisi lokal, regional, nasional, dan global. Usaha-usaha untuk mewujudkan Visi 2021-2026, dijabarkan dalam 5 (lima) Misi Pembangunan yang sebagai berikut :

1. Menghadirkan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel;
2. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas;
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan;
4. Mewujudkan kesejahteraan yang merata; dan
5. Mewujudkan masyarakat berperadaban

Dari misi di atas dan dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi, Bappeda Kota Cilegon mengambil peran dalam mensukseskan misi pertama yaitu “ **Menghadirkan Pemerintahan Kota yang Profesional dan akuntabel** “.

Melihat identifikasi permasalahan di Bappeda Kota Cilegon dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Bappeda Kota Cilegon yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

#### • **Faktor Pendorong :**

- Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.



- Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

• **Faktor Penghambat :**

- Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
- Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
- Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
- Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

### **III.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI**

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi Tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra OPD Kabupaten/Kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta



mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan Provinsi, Kabupaten/Kota.

Telaah terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas mengingat Bappeda Kota Cilegon mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam perencanaan pembangunan. Dalam Renstra Bappenas dicantumkan bahwa peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai think tank. Tugas penting Kementerian PPN/Bappenas lainnya adalah membangun dan mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan yang selama ini melibatkan instansi, perguruan tinggi dan organisasi profesi, diatur dengan kebijakan.

Tujuan utama dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan Nasional. Tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi dengan didukung 4 faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja.

Adapun telaah terhadap Renstra Bappeda Provinsi dilakukan terhadap dokumen Renstra Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Dalam Renstra Bappeda Provinsi Banten dicantumkan bahwa Bappeda Provinsi Banten memiliki tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan Urusan penunjang Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappeda Provinsi Banten menjalankan fungsi sebagai berikut:



1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **III.4 TELAHAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon yang selanjutnya disebut RTRW Kota Cilegon adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kota Cilegon, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maka pengertian rencana pola ruang adalah rencana yang menggambarkan letak, ukuran dan fungsi dari kegiatan-kegiatan lindung dan budidaya. Substansi dari rencana pola ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya



(kawasan lindung dan budidaya). Adapun tujuan pengembangan rencana pola ruang adalah:

1. Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lingkungan;
2. Tersedianya lahan yang dapat menampung perkembangan jumlah penduduk dan tenaga kerja;
3. Terciptanya sinkronisasi antara rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang dikembangkan;
4. Memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi eksisting; dan
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, rencana pola ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten berfungsi:

1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota;
2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
4. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota.



Tujuan Penataan Ruang Wilayah yaitu terwujudnya Kota Cilegon sebagai Kota pusat energi, Industri, Perdagangan dan Jasa yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka disusunlah kebijakan sebagai berikut:

1. peningkatan peran kota berbasis Pusat Energi dalam mendukung ekonomi Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
2. peningkatan peran kota berbasis industri, perdagangan dan jasa dalam mendukung ekonomi Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
3. pengembangan Kota Cilegon sebagai pusat pelayanan kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon;
4. pengembangan Kota Cilegon sebagai pusat pelayanan berskala regional;
5. pengembangan sistem pusat pelayanan Kota Cilegon;
6. penetapan kawasan strategis wilayah kota dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah;
7. penetapan RTH sebesar 30 % dari luas wilayah Kota Cilegon;
8. penetapan dan pengelolaan kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;
9. pengembangan sarana dan prasarana Kota Cilegon;
10. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana;
11. pengelolaan dan penataan ruang untuk sector informal;
12. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pedestrian;
13. pengembangan dan pengendalian kawasan budi daya; dan
14. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.





Tabel 3 1 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No	Rencana Struktur Ruang		Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenan	Arahan Lokasi Pengembangan
1	2		3	4	5
1	<b>Perwujudan Pusat kegiatan di wilayah Daerah</b>				
	1.1	Pusat Pelayanan Kota	Pusat Pelayanan Kota	Penataan Batas Kawasan Kota sebagai Ibukota Kota	Kecamatan Purwakarta
				Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kota Cilegon dalam rangka penataan intensitas tata massa bangunan sebagai antisipasi terhadap pengembangan ruang dan mitigasi bencana.	Kecamatan Purwakarta
				Penyusunan RDTR Kecamatan dan Kawasan Strategis Kota	Kecamatan Purwakarta
	1.2	Sub Pusat Pelayanan Kota	Sub Pusat Pelayanan Kota	Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kota Cilegon dalam rangka penataan intensitas tata massa bangunan sebagai antisipasi terhadap pengembangan ruang dan mitigasi bencana.	Kecamatan Pulomerak dan Kecamatan Citangkil
				Penyusunan RDTR Kecamatan dan Kawasan Strategis Kota	Kecamatan Pulomerak dan Kecamatan Citangkil
	1.3	Pusat Lingkungan	Pusat Lingkungan	Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kota Cilegon dalam rangka penataan intensitas tata massa bangunan sebagai antisipasi terhadap pengembangan ruang dan mitigasi bencana.	Kecamatan Jombang, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilegon, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Grogol, dan Kecamatan Pulomerak
				Penyusunan RDTR Kecamatan dan Kawasan Strategis Kota	Kecamatan Jombang, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilegon, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Grogol, dan Kecamatan Pulomerak
2	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana</b>				
	2.1	Sistem Jaringan Transportasi Darat	-		
	2.1.1	Jaringan Jalan		Pengembangan Jalan Arteri Primer	Ruas Jalan Merak-Batas Kota Cilegon, Ruas Jalan Batas Kota Cilegon- Batas Kota Serang, Ruas Jalan Akses Tol Merak
				Pengembangan Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1)	Ruas jalan Serdang – Bojonegar - Merak, Batas Kota Cilegon - Pasauran
				Pemeliharaan Jalan TOL	Ruas jalan Tangerang – Merak, Ruas jalan Cilegon – Bojonegara
				Pemeliharaan Jalan kolektor primer dua (JKP-2)	Ruas jalan Yasin Beji, Ruas Jalan Raya Industri
				Pemeliharaan dan pembangunan Jaringan Jalan Arteri sekunder	Jalan Aat – Rusli (JLS), Rencana pembangunan ruas Jalan Lingkar Utara (JLU)
				Pemeliharaan Jaringan jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder	jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder yang ada di Kota Cilegon

No	Rencana Struktur Ruang		Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenan	Arahan Lokasi Pengembangan
1	2		3	4	5
				Pembangunan Jalan Lokal menuju Kawasan Limbah B3	Ruas Jalan Kali timbang- Bulakan
				Pengembangan Terminal Penumpang tipe A	terminal terpadu merak-Kota Cilegon
				Pengembangan terminal Penumpang tipe C	Terminal Terminal Seruni di Kota Cilegon, Terminal kecil di Kecamatan Pulomerak, Terminal Pasar Baru Merak di Kecamatan Pulomerak, Terminal Pasar Kranggot di Kecamatan Jombang, Terminal Pasar Kelapa Kavling di Kecamatan Cilegon
				Perencanaan Terminal Tipe C	Terminal Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Pulomerak
	2.1.2	Jaringan Kereta Api		Pengembangan trayek kereta api	- lintas Tanah Abang – Cilegon, Tanah Abang - Cigading dan jaringan jalur kereta api khusus pada kawasan industri, jalur kereta api lintas utara - selatan dengan prioritas tinggi yang menghubungkan Merak – Rangkas Bitung – Jakarta
				Pengembangan Stasiun Kereta Api	stasiun kereta api terpadu pada kawasan Terminal Merak dan stasiun kereta api yang terdapat di Merak, Krenceng, Cigading dan Cilegon
	2.1.3	Sistem Jaringan Transportasi Laut		Pengembangan Pelabuhan	Pelabuhan Utama Banten di Kota Cilegon, Pelabuhan Utama Warnasari di Kecamatan Citangkil, pelabuhan pengumpul di Kecamatan Pulomerak, pelabuhan pengumpul di Ciwandan, pelabuhan Khusus TUKS Citangkil
				Pengembangan Terminal khusus	Terminal khusus yang berada di Kecamatan Ciwandan, Terminal khusus yang berada di Kecamatan Citangkil, Terminal khusus yang berada di Kecamatan Grogol, Terminal khusus yang berada di Kecamatan Pulomerak, Terminal penyeberangan Merak
				Pengembangan Alur Pelayaran	alur pelayaran Merak – Kepulauan Anak Gunung Krakatau sebagai angkutan wisata.
	2.2	Sistem Jaringan Energi	-		
	2.2.1	Jaringan Infrastruktur minyak gas dan bumi		Pengembangan jaringan pipa gas	Kecamatan Ciwandan ke Kecamatan Citangkil, Stasiun Meter di Kawasan Industri Kecamatan Citangkil ke kawasan industri di Kecamatan Grogol
	2.2.2	Jaringan Infrastruktur Ketenaga Listrik		Pengembangan pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Kecamatan Pulomerak
				Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Kawasan Industri di Kecamatan Citangkil
				Rencana Pembangunan Pembangkit	Kota Cilegon



No	Rencana Struktur Ruang		Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan
1	2		3	4	5
				listrik Tenaga Sampah (PLTSa)	
				Rencana pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Kota Cilegon
				Rencana pengembangan sistem distribusi saluran udara tegangan menengah (SUTM)	seluruh kecamatan di Kota Cilegon
				Rencana pengembangan sistem distribusi saluran udara tegangan rendah (SUTR)	seluruh kecamatan di Kota Cilegon
				Pengembangan sistem kabel bawah tanah	Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan Jalan Lingkar Utara (JLU)
				Pengembangan Gardu Induk	Kecamatan Citangkil
	2.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi	-	pengembangan transmisi penyiaran dengan sistem jaringan terrestrial	Kota Cilegon
				Rencana pembangunan serat optik antar kabupaten/kota	Kota Cilegon
				Rencana Pembangunan BTS secara terpadu berdasarkan Master Plan Tower Bersama	Kota Cilegon
				Pemeliharaan dan Pengendalian tower-tower seluler yang tidak berizin	Kota Cilegon
	2.4	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	-	Pemeliharaan Sumber daya air tanah	Kecamatan Grogol, Purwakarta, Jombang, Cibeber, dan Ciwandan
				Pengembangan sistem jaringan irigasi	irigasi Kedung Ingas dan Cibeber
				Pengembangan Sistem pengendalian banjir	Kota Cilegon
				Pengembangan jaringan air Baku melalui salinasi air laut sebagai bahan baku alternatif penyedia air bersih unruk kepentingan industri maupun Kota Cilegon	Pelabuhan Warnasari
	2.5	Infrastruktur Perkotaan	-		
	2.5.1	Sistem Penyediaan Air Minum Kota (SPAM)		Pengembangan Jaringan perpipaan berupa penyediaan air minum perpipaan	Kota Cilegon
				pengembangan bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa	Kota Cilegon
				memfasilitasi pemda, pemberdayaan masyarakat, dan dunia usaha/Swasta pada bidang aminum dan air limbah adar dapat berkorelasi dengan ditjen cipta karya.	Kota Cilegon
	2.5.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)		Pengembang sistem penyaluran air limbah domestik maupun non domestik	Kota Cilegon
				Pengembangan sistem pembuangan	Kota Cilegon



No	Rencana Struktur Ruang		Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan
1	2		3	4	5
				tinja dengan septic tank menjadi sistem komunal (IPAL Komunal)	
	2.5.3	Sistem Persampahan Kota		Penataan penggunaan lahan di sekitar kawasan TPA	Kecamatan Cilegon
				Mengembangkan buffer zone berupa RTH	Kota Cilegon
				Pengembangan kawasan dengan memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan, keselamatan dan berkelanjutan	Kota Cilegon
				Pengawasan pengelolaan kawasan TPA secara ketat	Kecamatan Cilegon
				Peningkatan pelayanan persampahan	Kecamatan Cilegon, Jombang, Grogol dan Pulomerak
				Penambahan daerah pelayanan baru	Kecamatan Citangkil dan Cibeber
				Pengembangan sistem TPS tembokmenjadi TPS kontainer	Kota Cilegon
				kajian penentuan lahan untuk TPS kontainer yang baru	Kota Cilegon
				Pengembangan Tempat penampungan sampah sementara (TPS)	di Kecamatan Cilegon, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Jombang, Kecamatan Grogol, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Citangkil, Kecamatan Pulomerak dan Kecamatan Ciwandan
				pengembangan Tempat pemrosesan akhir sampah (TPA)	Kecamatan Cibeber
	2.5.4	Sistem jaringan evakuasi bencana		pengembangan jalur evakuasi bencana	Jalur evakuasi bencana Kecamatan Citangkil: □ Jalan Raya Anyar □ Jalan Pintu KS
				pengembangan jalur evakuasi bencana	Jalur evakuasi bencana Kecamatan Ciwandan □ Jalan Fatahillah □ Jalan Sunan Kalijaga □ Jalan Aat-Rusli (Jalan Lingkar Selatan) □ Jalan Raya Anyar □ Jalan Umbul Burak - Nagreg
				pengembangan jalur evakuasi bencana	Jalur evakuasi bencana Kecamatan Grogol □ Jalan Lingkar Utara □ Jalan Raya Merak
				pengembangan jalur evakuasi bencana	Jalur evakuasi bencana Kecamatan Pulomerak □ Jalan Cipala
				pengembangan jalur evakuasi bencana	Jalur evakuasi bencana Kecamatan Purwakarta □ Jalan SA. Tirtayasa □ Jalan Jend. Sudirman
				Pengembangan ruang evakuasi bencana tsunami	□ SD Pulorida □ SD Gerem 3 □ Lapangan Terbuka Palm Hills □ Lapangan Terbuka Ciromo □ Karang Jetak Lor □ Kantor Kelurahan Randakari □ SMPN 04 Cilegon □ Kelurahan Jombang Wetan



No	Rencana Struktur Ruang		Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenan	Arahan Lokasi Pengembangan
1	2		3	4	5
					<input type="checkbox"/> Kelurahan Gunung Sugih, Ciwandan <input type="checkbox"/> Daerah Terbuka Kubang Lumbra Kidul
	2.5.5	Perwujudan Sistem Drainase Kota		Pengembangan sistem drainase kota sesuai dengan Rencana Induk Drainase	Kota Cilegon
				Normalisasi saluran primer	Kali Kedungingas dan Kali Seruni (Kali Cibeber)
				Pengendalian bangunan di daerah aliran sungai/kali	Kota Cilegon
				Rehabilitasi drainase yang melintasi jalan tol	Sekitar jalan tol
				Rehabilitasi drainase yang melintas Jalan Nasional	Kota Cilegon
				pembangunan kolam-kolam retensi dan meningkatkan sistem drainase baik primer maupun sekunder	Kota Cilegon
				Meningkatkan kualitas jaringan drainase sekunder	Jaringan jalan nasional Jaringan jalan provinsi
				Pembuatan dan peningkatan saluran drainase tersier yang dipadukan dengan drainase sekunder dan utama	Ruas jalan lingkungan
				Pengembangan sistem drainase pada kawasan banjir dengan sistem berjenjang terpadu	Sekitar Kel. Mekarsari, Kota Bumi, Ramanuju, Masigit, Jombang Wetan, Sukmajaya, Cibeber, Kebonsari, dan Tegal Ratu
				penertiban jaringan utilitas yang menghambat fungsi drainase	Kota Cilegon
	2.5.6	Sistem Pemadam Kebakaran		Pembangunan pos pemadam kebakaran	Seluruh Kecamatan
				Pembangunan hidran-hidran air	Sepanjang jalan arteri dan kawasan perumahan
				Pembangunan tandon-tdon air pemadam kebakaran	Seluruh Kecamatan
				Peningkatan sarana prasarana pendukung pemadam kebakaran lainnya	Seluruh Kecamatan

Tabel 3 2 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah

No	Rencana Pola Ruang		Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenan	Arahan Lokasi Pengembangan
1	2		3	4	5
1	<b>Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung</b>				
	1.1	kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya		Pemeliharaan dan pengayaan Kawasan hutan lindung	Seluruh hutan lindung
	1.2	Kawasan Perlindungan Setempat		Penanaman vegetasi jenis tanaman keras	sepanjang sisi sungai, sempadan pantai dan jalan arteri primer, arteri sekunder dan kolektor primer
				Pengayaan tanaman	sepanjang sisi sungai, sempadan pantai dan jalan arteri primer, arteri sekunder dan kolektor primer



No	Rencana Pola Ruang		Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenan	Arahan Lokasi Pengembangan
				Pemeliharaan kawasan perlindungan setempat tetap sesuai fungsinya	Seluruh kawasan perlindungan setempat
	1.3	Kawasan Lindung Geologi		Pemeliharaan Kawasan sempadan mata air	mata air Ciputri di Kelurahan Cikerei Kecamatan Cibeber
	1.4	Perwujudan Kawasan konservasi		Pemeliharaan dan pelestarian keberlangsungan kawasan konservasi	Pulau Ular, Pulau Merak Besar, Pulau Merak Kecil, Pulau Rida, dan Pulau Tempurung
	1.5	Perwujudan Kawasan rawan bencana alam		Penanaman tanaman yang berfungsi sebagai penahan gelombang	Di sempadan pantai
				Membangun green belt industri	Di dalam Kawasan Industri PT. KS Group
				Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana tsunami berupa ruang-ruang terbuka	Kota Cilegon
	1.6	Perwujudan Kawasan cagar Budaya		pemeliharaan karakteristik bangunan dan lingkungan sekitarnya	Seluruh Kawasan Cagar Budaya
				Revitalisasi kawasan	Seluruh Kawasan Cagar Budaya
	1.7	Penyediaan dan Pemanfaatan RTH		Pengembangan kawasan RTH sebagai bagian dari pengembangan fasum dan taman kota/lingkungan	Kota Cilegon
				Pengembangan kawasan RTH sebagai pembatas antara Kawasan Industri dengan kawasan fungsional lain disekitarnya sebesar 30%	Sekitar Kawasan industri
				Penyediaan taman-taman lingkungan	Di setiap Pusat pelayanan lingkungan
				Penyediaan dan pengembangan taman-taman RTH privat	Kota Cilegon
<b>2</b>	<b>Perwujudan Kawasan Budidaya</b>				
	2.1	Kawasan Hutan Produksi		Pengembangan komoditas unggulan dan budi daya tanaman hutan	Kecamatan Pulomerak dan Kecamatan Grogol
	2.2	Kawasan Pertanian		Pelestarian Kawasan Tanaman Pangan	Kecamatan Cibeber, Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Jombang, Kecamatan Purwakarta,
				Pelestarian Kawasan hortikultura	Kecamatan Cibeber
				Pelestarian Kawasan Perkebunan	Kawasan Perkebunan
				nilai tambah hasil pertanian Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk meningkatkan produksi dan	Seluruh Kawasan pertanian
				Penetapan dan Pelestarian Kawasan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kecamatan Cibeber
	2.3	Kawasan Pertambangan dan Energi		Pemetaan detail kawasan energi yang telah direkomendasikan	Seluruh Kawasan Pertambangan dan energi terkait
				Pembebasan Lahan kawasan energi yang telah direkomendasikan	Seluruh Kawasan Pertambangan dan energi terkait
				Pembuatan prosedur perizinan & mekanisme pemanfaatan serta pengendalian pertambangan dan energi.	Seluruh Kawasan Pertambangan dan energi terkait
	2.4	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri		Pengembangan dan pembangunan kawasan	Kec. Ciwandan dan Pulomerak

No	Rencana Pola Ruang		Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenan	Arahan Lokasi Pengembangan
				industri yang ramah lingkungan	
				Pengalokasian industri kecil dan menengah berwawasan lingkungan	Kec. Citangkil, Cilegon, Cibeber, dan Jombang
				Pembangunan Kawasan Limbah B3	Kec. Cibeber
				Pembebasan Lahan untuk Limbah B3	Kec. Cibeber
				Pengembangan kegiatan Pelabuhan dan Pergudangan	Kec. Ciwandan
	2.5	Perwujudan Rencana Kawasan Pariwisata		Pengembangan Kawasan Wisata Buatan Pusat Kota	Kelurahan Ramanuju dan Kelurahan Kebundalem Kec. Purwakarta
				Pengembangan Kawasan Wisata Pantai	Kawasan pariwisata yang memiliki potensi wisata pantai
				Pengembangan fasilitas pendukung kegiatan wisata	Kawasan Wisata
				Pengembangan kegiatan wana wisata yang direncanakan dalam kawasan lindung	Kec. Pulomerak
	2.6	Perwujudan Kawasan Permukiman			
	2.6.1	Kawasan Perumahan		Peremajaan kawasan melalui konsolidasi lahan dan/atau dengan pola pengembangan perumahan vertikal	Sedang - Tinggi
				pemeliharaan prasarana lingkungan perumahan	Seluruh Kawasan Perumahan
				penetapan dan pemeliharaan perumahan dan/atau rumah yang menjadi ciri khas daerah dalam kerangka perlindungan cagar budaya	Seluruh Kota
	2.6.2	Perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa		Penyusunan pedoman pengemb. kawasan perdagangan dan jasa	Sepanjang Jalan Arteri Primer dan Jalan Lingkar luar selatan
				Relokasi pasar lingkungan yang sudah tidak sesuai dengan peruntukan RTRW	Seluruh Kota
				Pemerataan fasilitas perdagangan	Seluruh Kota
				Pembatasan pertumbuhan dan pengembangan konsep perdagangan linier sepanjang jalan arteri dan kolektor	Sepanjang Jalan Arteri dan Kolektor
				Pemberian insentif bagi sektor formal dalam penyediaan ruang bagi kegiatan pedagang kaki lima	Seluruh Kawasan Perdagangan dan Jasa
	2.6.3	Perwujudan Kawasan Perkantoran		Pengoptimalan pengembangan kawasan kantor pemerintahan kota maupun pusat skala kota	Kel. Ramanuju
				Pengembangan kawasan pemerintahan dan bangunan umum yang diintegrasikan dengan RTH dan taman kota	Kel. Ramanuju
				Penyusunan dan pengembangan rencana peruntukan lahan kawasan pemerintahan dan bangunan umum	Koridor Lingkar luar selatan
	2.6.4	Perwujudan Kawasan Peribadatan		penetapan fasilitas peribadatan dalam lingkungan permukiman	Seluruh Kota
				pemeliharaan fasilitas peribadatan	Seluruh Kota
	2.6.5	Perwujudan Kawasan Pendidikan		penetapan fasilitas pendidikan TK	Seluruh Kota



No	Rencana Pola Ruang		Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenan	Arahan Lokasi Pengembangan
				dan SD dalam lingkungan permukiman	
				Penetapan lokasi pembangunan untuk pendidikan tinggi	Kecamatan Cibeber
	2.6.6	Perwujudan Kawasan Olah Raga		penetapan Kawasan olah raga dalam lingkungan permukiman	Kecamatan cibeber, Kecamatan Purwakarta
	2.6.7	Perwujudan Kawasan Transportasi		Pengalokasian ruang bagi stasiun kereta	Kecamatan Pulomerak
				Pengalokasian ruang dan membangun kawasan perniagaan	Kecamatan Pulomerak
				Pengembangan terminal terpadu yang mengintegrasikan kegiatan pelabuhan penyeberangan, pelabuhan kapal cepat, terminal, stasiun kereta, kawasan perniagaan dan prasarana pendukungnya	Kecamatan Pulomerak
				Penataan kembali kawasan pelabuhan	Kecamatan Pulomerak
				Penyusunan manajemen rekayasa lalu lintas di kawasan terminal	Kecamatan Pulomerak
				Pengalokasian ruang dan membangun Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Kecamatan Pulomerak
	2.6.8	Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau		Penyusunan rencana aksi pengembangan danau/Situ Rawa Arum	Situ Rawa Arum
				Pengembangan Situ Rawa Arum	Situ Rawa Arum
				Penyediaan dan pembangunan danau di dalam kawasan permukiman dan kawasan industri	Seluruh Kawasan Permukiman dan Kawasan industri
				Membuat saluran-saluran air menuju badan pond	Seluruh Kota
				Penyediaan daerah koridor/ penyangga pada bibir waduk/ danau/ situ sebagai RTH	Waduk Krenceng, Situ Rawa Arum, dan Kolam-kolam retensi
	2.6.9	Prasarana dan Sarana Ruang Evakuasi Bencana		Penetapan lokasi posko utama dan alternatif, tempat penampungan sementara, dan titik lokasi evakuasi bencana	Posko utama & alternatif, tempat penampungan sementara, lokasi evakuasi
				Pemanfaatan ruang evakuasi bencana sebagai Ruang Terbuka dan/atau Ruang Terbuka Hijau	Posko utama & alternatif, tempat penampungan sementara, lokasi evakuasi
	2.6.10	Kawasan Pertahanan dan Keamanan		Penetapan Pos Angkatan Laut	Kecamatan Pulomerak

Tabel 3.3 Hasil Telaahan Pengembangan Kawasan Strategis

No	Rencana Pengembangan Kawasan Strategis	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenan	Arahan Lokasi Pengembangan
1	2	4	5
1	Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis	Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kota	RDTR Ciwandan dan Citangkil
		Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kota	RDTR Purwakarta dan Jombang
		Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kota	RDTR Pulomerak dan Grogol
		Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kota	RDTR Cibeber dan ilegon

No	Rencana Pengembangan Kawasan Strategis	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenan	Arahan Lokasi Pengembangan
		Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kota	Kawasan Strategis Cilegon Utara
		Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kota	Kawasan Strategis Cilegon Selatan
		Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kota	Kawasan Strategis Cilegon Tengah
		Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kota	Kawasan Strategis Waduk Krenceng
		Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kota	Kawasan Tertentu Lainnya
		Pengembangan kawasan strategis dengan optimalisasi lahan yang ada dan penataan transportasi	Kawasan Strategis
		Peningkatan kualitas kawasan	Kawasan Strategis
		Penetapan kawasan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Kawasan Strategis

Keselarasan program prioritas daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040 sebagaimana dijabarkan pada matriks sinkronisasi sebagai berikut :

Tabel 3 4  
Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Matriks Indikasi Program RTRW Kota Cilegon 2020-2040

No	Program / Kegiatan Prioritas Daerah	Usulan Program Utama		Lokasi	Instansi Pelaksana
		Perwujudan Pola Ruang Wilayah	Perwujudan Struktur Ruang		
1	Peningkatan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN				
2	Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah				
3	Peningkatan Kualitas Layanan Publik				
	- Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-----	-----	-----	-----
	- Pelayanan publik satu atap (Mall Pelayanan Publik)	Pengoptimalan pengembangan kawasan kantor pemerintahan kotamadya pusat skala kota	-----	Kel. Ramanuju	Dinas PUPR dan instansi terkait lainnya
	- Pembangunan Gedung kantor PD dan rumah dinas yang representatif	Pengoptimalan pengembangan kawasan kantor pemerintahan kota maupun pusat skala kota	-----	Kel. Ramanuju	Dinas PUPR dan instansi terkait lainnya
	- Pembangunan Gedung Serbaguna	Penyusunan dan pengembangan rencana peruntukan lahan kawasan pemerintahan dan bangunan umum	-----	Koridor jalan Lingkar Selatan	Dinas PUPR dan instansi terkait lainnya
4	Peningkatan Sarpras Pendidikan yang berkualitas dan merata				
	- Pembangunan SMP Negeri	Penetapan Fasilitas Pendidikan TK dan SD dalam lingkungan Permukiman	Seluruh wilayah kota	Seluruh wilayah kota	Dinas PUPR dan instansi terkait lainnya



No	Program / Kegiatan Prioritas Daerah	Usulan Program Utama		Lokasi	Instansi Pelaksana
		Perwujudan Pola Ruang Wilayah	Perwujudan Struktur Ruang		
	- Pemenuhan sarpras sekolah sesuai standar	Penetapan Fasilitas Pendidikan TK dan SD dalam lingkungan Permukiman	-----	Seluruh wilayah kota	Dinas PUPR dan instansi terkait lainnya
		Penetapan Lokasi pembangunan untuk pendidikan tinggi	-----	Kecamatan Cibeebr	Dinas PUPR dan instansi terkait lainnya
5	Peningkatan Kualitas Layanan dan Perluasan Akses Kesehatan				
6	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial				
	- Perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial kota	Penetapan lokasi posko utama dan alternatif, tempat penampungan sementara dan titik lokasi evakuasi bencana	pengembangan jalur evakuasi bencana - pengembangan ruang evakuasi bencana tsunami	Posko utama & alternatif, tempat penampungan sementara, lokasi evakuasi	BPBD dan instansi terkait lainnya
7	Fasilitasi perekonomian pelaku usaha mikro kecil				
	- Pembangunan rumah siap kerja (Pusat layanan usaha terpadu untuk UMK)	Pengembangan fasilitas pendukung kegiatan wisata	Pengembangan Jaringan Arteri Primer	Kawasan Wisata	Dinas Koperasi dan UMK
	- Pengembangan kampung batik dan kuliner	Pengalokasian industri kecil dan menengah berwawasan lingkungan	Pemeliharaan dan pembangunan Jaringan Jalan Arteri Sekunder	Kec. Citangkil, Cilegon, Cibeer, Jombang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pengembangan Kawasan Wisata Buatan Pusat Kota	Pemeliharaan Jaringan Jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder	Kel. Ramanuju dan Kel. Kebondalem Kec. Purwakarta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan instansi lainnya yang terkait
8	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja				
9	Peningkatan inovasi pendapatan daerah				
	- Pembentukan BUMD pengelolaan limbah industri dan BUMD investasi	Pembangunan kawasan Limbah B3	-----	Kec. Cibeber	Investor, DPMPTSP dan instansi terkait lainnya
		Pembebasan Lahan untuk Limbah B3	-----	Kec. Cibeber	DPMPTSP dan instansi terkait lainnya
	- Pembangunan Pelabuhan Warnasari	-----	Pengembangan Pelabuhan Utama Warnasari	Kec. Citangkil	Kemen. PerhubunganK/L terkait lainnya
10	Penyediaan ruang publik yang representatif dan ramah difabel				



No	Program / Kegiatan Prioritas Daerah	Usulan Program Utama		Lokasi	Instansi Pelaksana
		Perwujudan Pola Ruang Wilayah	Perwujudan Struktur Ruang		
	- 43 ruang terbuka publik (alun-alun kelurahan)	Pengembangan kawasan sebagai bagian dari pengembangan fasum dan taman kota/lingkungan	-----	Seluruh Wilayah Kota	Dinas Perkim dan instansi terkait lainnya
	- 8 fasilitas hobi dan komunitas	Penyediaan taman-taman lingkungan	-----	Di Setiap Pusat Pelayanan Lingkungan	Dinas Perkim dan instansi terkait lainnya
11	Peningkatan kualitas infrastruktur dan visual kota				
	- Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dalam daerah Kabupaten/Kota	-----	Pengembangan jaringan perpipaan berupa penyediaan air minum perpipaan	Seluruh Wilayah Kota	Kementerian PUPR dan K/L lainnya
		-----	Pengembangan bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa	Seluruh Wilayah Kota	-----
		-----	Fasilitasi pemda, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha/swasta pada bidang air minum agar dapat berkorelasi dengan ditjen cipta karya	Seluruh Wilayah Kota	-----
	- Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota F31	-----	Pengembangan sistem penyaluran air limbah domestik maupun non domestik	Seluruh Wilayah Kota	Dinas Perkim dan instansi terkait lainnya
		-----	Pengembangan sistem pembuangan tinja dengan septictank menjadi sistem komunal (IPAL Komunal)	Seluruh Wilayah Kota	Dinas Perkim dan instansi terkait lainnya
	- Pembangunan landmark "markah" CILEGON	Peningkatan Kualitas Kawasan	-----	Kawasan Strategis Kota	DPUR dan dinas terkait lainnya
	- Pembangunan TPU Cikerei menjadi TPU modern	Pengembangan kawasan RTH sebagai bagian dari pengembangan fasum dan taman kota/lingkungan	-----	Seluruh Wilayah Kota	Kementerian PUPR dan K/L lainnya PUPR, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Investor/Swasta



No	Program / Kegiatan Prioritas Daerah	Usulan Program Utama		Lokasi	Instansi Pelaksana
		Perwujudan Pola Ruang Wilayah	Perwujudan Struktur Ruang		
	- PJU Lingkungan	Peningkatan Kualitas Kawasan	-----	Kawasan Strategis Kota	DPUTR dan dinas terkait lainnya
	- Pembangunan JLU	-----	-----	Rencana Pembangunan ruas Jalan Lingkar Utara	DPUTR
	- Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan kota	-----	-----	Jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder yang ada di Kota Cilegon	DPUTR
	- Peningkatan jalan-jalan penghubung tingkat kecamatan dan kelurahan	-----	-----	Jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder yang ada di Kota Cilegon	DPUTR
	- Peningkatan Jalan penghubung tempat wisata	-----	-----	Jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder yang ada di Kota Cilegon	DPUTR
	- Peningkatan Jalan penghubung ke tempat pendidikan (SMP 12, SMP 13, SMP 14, dan SMP 15)	-----	-----	Jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder yang ada di Kota Cilegon	DPUTR
	- Peningkatan Jalan penghubung ke Kawasan Pertanian Terpadu	-----	Pembangunan Jalan Lokal menuju kawasan Limbah B3	Ruas Jalan Kalitimbang - Bulakan	DPUTR
	- Pengelolaan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)	Pengembangan kawasan strategis dengan optimalisasi lahan yang ada dan penataan transportasi	Perencanaan Terminal Type C di Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Pulomerak (pengadaan tanah dan pembangunan terminal Type C)	Kecamatan Ciwandan - Kecamatan Pulomerak - Kawasan strategis kota	Dinas Perhubungan
12	Peningkatan destinasi wisata dan pelestarian budaya daerah				
	- Pembangunan Monumen Geger Cilegon	Pemeliharaan karakteristik bangunan dan lingkungan sekitarnya	-----	Seluruh Kawasan Cagar Budaya	Dinas Perkim dan instansi terkait lainnya
		Revitalisasi Kawasan	-----	Seluruh Kawasan Cagar Budaya	Dinas Perkim dan instansi terkait lainnya
		Penetapan dan pemeliharaan perumahan dan/atau rumah yang menjadi ciri khas daerah dalam rangka perlindungan cagar budaya	-----	Seluruh Kota	Dinas Perkim dan instansi terkait lainnya



No	Program / Kegiatan Prioritas Daerah		Usulan Program Utama		Lokasi	Instansi Pelaksana
			Perwujudan Pola Ruang Wilayah	Perwujudan Struktur Ruang		
	-	Penataan Destinasi Wisata	Pengembangan Kawasan Wisata Buatan Pusat Kota	-----	Kel. Ramanuju dan Kel. Kebondalem Kec. Purwakarta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan instansi terkait lainnya
			Pengembangan Kawasan Wisata Pantai	-----	Kawasan pariwisata yang memiliki potensi pantai	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan instansi terkait lainnya
			Pengembangan Fasilitas Pendukung kegiatan wisata	-----	Kawasan Wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan instansi terkait lainnya
			Pengembangan kegiatan wana wisata yang direncanakan di kawasan lindung	-----	Kec. Pulomerak	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan instansi terkait lainnya
			Pengembangan Situ Rawaarum	-----	Situ Rawaarum Kec. Grogol	DPUTR dan dinas terkait lainnya
			Penyusunan Rencana Aksi pengembangan Situ Rawaarum	-----	Situ Rawaarum Kec. Grogol	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan instansi terkait lainnya
13		Pemasyarakatan nilai-nilai luhur keagamaan	Penetapan fasilitas peribadatan dalam lingkungan permukiman	-----	Seluruh kota	DPUTR dan dinas terkait lainnya
14		Peningkatan mitigasi bencana dan pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup				
	-	Pembangunan tandon	Pembangunan tandon tandon air pemadam kebakaran	Pembangunan kolam kolam retensi dan meningkatkan sistem drainase baik primer maupun sekunder	seluruh kecamatan	DPUTR dan dinas terkait lainnya
	-	Pelayanan Informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana bencana serta penyelamatan dan evakuasi bencana	Penetapan lokasi posko utama dan alternatif, tempat penampungan sementara dan titik lokasi evakuasi bencana	-----	seluruh kecamatan	BPBD dan instansi terkait
			Penanaman tanaman yang berfungsi sebagai penahan gelombang	-----	-----	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan instansi terkait



No	Program / Kegiatan Prioritas Daerah		Usulan Program Utama		Lokasi	Instansi Pelaksana
			Perwujudan Pola Ruang Wilayah	Perwujudan Struktur Ruang		
			Membangun green belt industri	-----	-----	Kementerian BUMN dan K/L terkait
			Rencana Pengembangan ruang evakuasi bencana tsunami berupa ruang-ruang terbuka.	-----	seluruh Kota	BPBD dan instansi terkait
			-----	peningkatan sarana prasarana pendukung pemadam kebakaran	seluruh kecamatan	Dinas Damkar dan Instansi terkait
			-----	Pembangunan hidran-hidran air	seluruh Kota	Dinas Damkar dan Instansi terkait
			-----	Pembangunan pos pemadam kebakaran	seluruh kecamatan	Dinas Damkar dan Instansi terkait
	-	Peningkatan TPS 3R, bank sampah, TPSA dan TPA Sanitary Landfill	-----	Penataan penggunaan lahan sekitar kawasan TPA	Kecamatan Cilegon	DLH dan instansi terkait
			-----	Mengembangkan buffer zone berupa RTH	Kecamatan Cilegon	DLH dan instansi terkait
			-----	Pengembangan kawasan dengan memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan, keselamatan dan berkelanjutan	Seluruh kecamatan	DLH dan instansi terkait
			-----	Pengawasan pengelolaan kawasan TPA secara ketat	Kecamatan Cilegon	DLH dan instansi terkait
			-----	Peningkatan pelayanan persampahan	Kec/ Cilegon, Jombang, Grogol dan Pulomerak	DLH dan instansi terkait
			-----	Penambahan daerah pelayanan baru	Kecamatan Citangkil dan Kec. Cibeber	DLH dan instansi terkait
			-----	Pengembangan Sistem TPS tembok menjadi TPS kontainer	Seluruh kecamatan	DLH dan instansi terkait
			-----	Kajian penentuan lahan untuk TPS kontainer yang baru	Seluruh kecamatan	DLH dan instansi terkait





No	Program / Kegiatan Prioritas Daerah		Usulan Program Utama		Lokasi	Instansi Pelaksana
			Perwujudan Pola Ruang Wilayah	Perwujudan Struktur Ruang		
			-----	Pengembangan Tempat Penampungan Sampah sementara (TPS)	Seluruh kecamatan	DLH dan instansi terkait
			-----	Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)	Kecamatan Cilegon	DLH dan instansi terkait
15	Peningkatan nilai tambah produk pertanian serta diversifikasi pangan					
	-	Pembangunan Sentra nelayan	Pengalokasian ruang dan membangun Pangkalan pendaratan Ikan (PPI)	-----		Kementerian Kelautan dan Perikanan
	-	Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu	Pelestarian Kawasan hortikultura	-----	Kec. Cibeber	Kementerian Pertanian dan K/L terkait
			Penetapan dan pelestarian Kawasan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (KP2B)	-----	Kec. Cibeber, Ciwandan, Jombang, Purwakarta	Kementerian Pertanian dan DKPP
	-	Gerakan Masyarakat Urbang Farming	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian	-----	Seluruh kecamatan	DKPP dan instansi terkait
16	Penegakan hukum, trantibum dan linmas					
17	Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kewilayahan					
	-	100 juta per tahun dana lingkungan RW dengan perluasan penggunaannya	pemeliharaan fasilitas peribadatan	-----	seluruh kota	DPUPR dan instansi terkait
			Pemeliharaan prasarana lingkungan perumahan	-----	seluruh kawasan perumahan	Dinas Perkim dan instansi terkait
18	Peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan					
19	Peningkatan Daya saing pemuda dan olahraga					



No	Program / Kegiatan Prioritas Daerah	Usulan Program Utama		Lokasi	Instansi Pelaksana
		Perwujudan Pola Ruang Wilayah	Perwujudan Struktur Ruang		
	- Pembangunan arena olahraga pemuda	Penetapan Kawasan Olahraga dalam lingkungan Perumahan	-----	Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Purwakarta	Dinas Perkim, Dispora dan instansi terkait Dinas Perkim, Dispora dan instansi terkait Dinas Perkim, Dispora dan instansi terkait
		Penyediaan taman-taman lingkungan	-----	Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Purwakarta	Dinas Perkim, Dispora dan instansi terkait Dinas Perkim, Dispora dan instansi terkait Dinas Perkim, Dispora dan instansi terkait
		Penyediaan dan Pengembangan tamantaman RTH privat	-----	Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Purwakarta	Dinas Perkim, Dispora dan instansi terkait Dinas Perkim, Dispora dan instansi terkait Dinas Perkim, Dispora dan instansi terkait
	- Optimalisasi fungsi sport centre	Penetapan kawasan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha	-----	Kec. Cibeber dan Kawasan strategis	DPUPR, Dispora dan instansi terkait

KLHS RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen RPJMD.

Berdasarkan batasan tersebut penyusunan KLHS RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026 tidak akan lepas dari indikator-indikator dalam Tujuan



Pembangunan Berkelanjutan, selain menghasilkan masukan dalam penyusunan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026.

Setelah dilakukan analisa terhadap tujuan TPB dan Visi Misi Walikota terpilih 2021-2026 maka terdapat 9 tujuan TPB yang dapat disinkronkan dengan baik itu kewenangan dan prioritas Visi Misi Walikota terpilih 2021-2026, terdapat 2 tujuan TPB yang belum tercantum dalam Visi Misi dan Program Prioritas Walikota terpilih 2021-2026, dan terdapat 6 tujuan TPB yang kewenangannya berada diluar Pemerintah kota Cilegon pemetaan secara lengkap dapat dilihat dari matriks dibawah ini:

*Tabel 3 5 Matriks Sinkronisasi Tujuan RPJMD 2021-2026 dan Tujuan TPB*

<b>VISI:</b>		
<b>MEWUJUDKAN CILEGON BARU, MODERN DAN BERMARTABAT</b>		
<b>MISI:</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS:</b>	<b>TUJUAN TPB</b>
Menghadirkan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Membangun Command center	Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
	Pelayanan publik satu atap berbasis teknologi	
	Menurunkan tingkat korupsi	
	Promosi jabatan berdasarkan prestasi dan kompetensi	
	Perizinan satu atap	
Mewujudkan kesejahteraan yang merata	Meningkatkan fasilitas kota yang baik	Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi
		Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua
	Menjamin kebutuhan dasar bagi keluarga miskin	Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
	Meningkatkan daya beli masyarakat (UMKM)	Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua
	Menggali potensi ekonomi berbasis budaya dan kearifan lokal bernilai ekspor	
	Membangun rumah siap kerja	
	Menjadikan Cilegon kota industri dan jasa	Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
	Membangun iklim investasi yang kondusif	



VISI:		
MEWUJUDKAN CILEGON BARU, MODERN DAN BERMARTABAT		
MISI:	PROGRAM PRIORITAS:	TUJUAN TPB
Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas	Partisipasi lama sekolah 12 tahun	Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua
	Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan	
	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	
	Meningkatkan akreditasi seluruh sekolah	
	100% guru SD dan SMP minimal S1	
	Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan kelas RSUD menjadi kelas A	Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
	Menambah dokter dan tenaga medis hingga ke puskesmas	
	Meningkatkan fasilitas kesehatan	
	Ambulans gratis	
	Pembiayaan BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin	
	Puskesmas keliling	
Mewujudkan Masyarakat Berperadaban	Tunjangan kematian bagi rakyat miskin	Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
	Membangun Cilegon kota pariwisata sejarah, budaya dan religius	Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
	Membangun visual kota Cilegon yang mempesona	
	Menjamin keamanan	
	Membangun ruang publik	
	Membangun Cilegon sebagai smart city	Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
	Membangun masyarakat yang menguasai Iptek	
	Membangun masyarakat yang partisipatif	Tujuan 5: Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
	Membangun fasilitas bagi penyandang difabel	
Tidak terpetakan dalam visi dan misi		Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati



VISI:		
MEWUJUDKAN CILEGON BARU, MODERN DAN BERMARTABAT		
MISI:	PROGRAM PRIORITAS:	TUJUAN TPB
Diluar kewenangan Pemerintah Kota		Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
		Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua
		Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara
		Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
		Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
		Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan
		Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan

### III.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya. Isu strategis dalam rancangan awal RPJMD tahun 2021-2026 Kota Cilegon di jelaskan dalam table berikut:

*Tabel 3 6 Isu Strategis dalam perencanaan pembangunan*

No	Aspek	Isu Strategis
I	Kualitas sumber daya manusia, kemiskinan dan kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan kesehatan masyarakat dan individu yang belum optimal (penggunaan TI, manajemen aduan, kuantitas dan kualitas NaKes, Sarpras)</li> <li>2. Peran serta masyarakat yang belum optimal (kesadaran masyarakat, inovasi promosi preventif, pendampingan)</li> <li>3. Pengendalian dan tata kelola kependudukan belum optimal (kemudahan pelayanan, integrasi data, kuantitas penyuluh KB)</li> <li>4. Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum optimal (SDM belum tersedia, kepedulian kurang, Advokasi KIE)</li> </ol>

No	Aspek	Isu Strategis
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Peran pemuda dalam pembangunan belum optimal (sarpras ruang publik, sinergitas)</li> <li>Peran olah raga dalam pembangunan yang belum optimal (fasilitas olahraga, pembinaan, inovasi promotive)</li> <li>Partisipasi masyarakat untuk saling melindungi yang masih rendah (berbagi peran, kesadaran hukum, pemahaman nilai Pancasila, informasi hukum)</li> <li>Belum optimalnya pengelolaan sistem pendidikan daerah (daya tampung, kuantitas dan kualitas pengajar , sarpras, kurikulum)</li> <li>Cakupan literasi dan gemar membaca masyarakat belum memadai (sarpras, budaya literasi, sinergitas)</li> <li>Belum optimalnya pengelolaan sistem kesejahteraan masyarakat (data kemiskinan, stimulus tidak merata, penerima terbatas)</li> <li>Belum optimalnya pengelolaan angkatan dan tenaga kerja daerah (pengangguran), (pemagangan, mismatch kualifikasi, vokasional, sarpras, sinergitas)</li> </ol>
II	Kualitas dan daya saing perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya peran sektor pertanian dalam perekonomian daerah (produksi, produktivitas dan nilai tambah produk)</li> <li>Layanan perdagangan belum optimal (Sarpras, manajemen pasar, penggunaan TI, moda transportasi)</li> <li>Daya saing UMKM masih rendah (SDM, manajemen, produksi, pemasaran. penggunaan TI, pendampingan)</li> <li>Investasi padat karya belum berkembang (regulasi, insentif investasi padat karya, dukungan infrastruktur)</li> <li>Belum berkembangnya ekonomi kreatif (Ruang public, event, sarpras)</li> </ol>
III	Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pelayanan air minum</li> <li>Belum optimalnya pelayanan limbah domestik</li> <li>Penataan arsitektur kota (city branding) belum optimal (Perencanaan, pengendalian)</li> <li>Pengembangan smart city belum optimal (road map, infrastruktur, sdm)</li> <li>Keterbatasan ketersediaan RTH public (standar belum tercapai, perubahan fungsi lahan, ketersediaan lahan)</li> <li>Keterbatasan infrastruktur ekonomi kota (perencanaan, kapasitas dan kualitas infrastuktur)</li> </ol>
IV	Penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup (tata kelola dan mitigasi pencemaran udara, air dan tanah)</li> <li>Upaya pengurangan dan penanganan sampah masih sangat rendah (regulasi, daur ulang rendah)</li> <li>Upaya penanganan sampah masih sangat rendah (cakupan layanan, teknologi)</li> <li>Mitigasi bencana belum optimal (perencanaan, sistem, regulasi)</li> <li>Upaya penanganan banjir</li> </ol>
V	Kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih lemahnya penegakan hukum di ruang public (regulasi, pengawasan, pengendalian, koordinasi)</li> <li>Belum tergalinya potensi penerimaan dan pengelolaan pendapatan daerah yang ada (pengembangan potensi, kerjasama lintas sektor, penggunaan TI)</li> <li>Belum optimalnya Manajemen perubahan (Budaya Kerja)</li> <li>Belum optimalnya Penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan belum optimal (sinergitas, SDM legal drafter)</li> <li>Belum optimalnya Penataan kelembagaan/organisasi belum optimal dilaksanakan (struktur kelembagaan, tupoksi dan target kinerja)</li> <li>Belum optimalnya Penataan tata laksana belum optimal (SPBE, pengelolaan arsip, pengelolaan asset, pengelolaan keuangan, informasi puiblik)</li> <li>Belum optimalnya Sistem manajemen aparatur belum optimal (kesesuaian kompetensi, reward and punishment, keterbatasan SDM, penggunaan TI)</li> <li>Akuntabilitas kinerja</li> <li>Belum optimalnya Kualitas pengawasan belum optimal (kuantitas dan kualitas SDM, pendampingan)</li> </ol>



No	Aspek	Isu Strategis
		10. Belum optimalnya kualitas pelayanan public (Integrasi layanan aduan, perijinan dan investasi, penggunaan TI, SDM, regulasi) 11. Terjaganya harmonisasi pembangunan baik secara bertikal, horizontal maupun kewilayahan (regulasi, sinkronisasi )

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 - 2026 yakni:

1. Tingkat akurasi dan ketersediaan data sektoral masih perlu ditingkatkan dan diintegrasikan dalam pengelolaan yang terpadu agar menjadi input yang tepat dalam penyusunan perencanaan;
2. Integrasi perencanaan dan penganggaran melalui penggunaan Sistem Aplikasi masih belum optimal;
3. Masih belum optimalnya ketersediaan data sektoral pembangunan daerah sebagai input/instrumen utama dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah;
4. Kualitas dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan dari sisi ketepatan, keterukuran dan konsistensi;
5. Pemahaman SDM perencana di OPD terhadap prinsip-prinsip perencanaan yang masih harus ditingkatkan, khususnya terkait dengan substansi dokumen perencanaan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah, Bappeda Kota Cilegon menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Visi dan Misi RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026 yang berbunyi :

Visi : “Mewujudkan Cilegon Baru, Modern Dan Bermartabat”

Misi : “Menghadirkan Pemerintahan Daerah Yang Profesional Dan Akuntabel”.

Sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026 tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Cilegon dalam jangka menengah diuraikan dalam table sebagai berikut:

*Tabel 4 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah*

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	62,97	71,22	75,3	78	82,2	84,2
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan profesionalitas aparatur							
			Nilai Laki Perangkat Daerah	77	80	80	80	81	81
			Indeks RB Perangkat Daerah	65	70	75	76	80	85
			Indeks Perencanaan	91%	92%	93%	94%	95%	95%





N o	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	91%	92%	93%	94%	95%	95%
		Meningkatnya Budaya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	340	489	490	500	510	550



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya, maka rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappeda Cilegon dalam lima tahun mendatang, sebagaimana diuraikan pada table berikut :

*Tabel 5 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan*

**VISI : Mewujudkan Cilegon Baru, Modern Dan Bermartabat**

**MISI I : Menghadirkan Pemerintahan Daerah Yang Profesional Dan Akuntabel**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan profesionalitas aparatur	Meningkatkan profesionalisme manajemen sdm, asset, keuangan, perencanaan, informasi dan kearsipan di tingkat perangkat daerah	Peningkatan pengelolaan sdm, asset, keuangan, perencanaan, informasi dan kearsipan di tingkat perangkat daerah
		Meningkatkan kualitas perencanaan dan informasi pembangunan daerah	Peningkatan kualitas proses perencanaan pembangunan
			Peningkatan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
			Peningkatan integrasi data pembangunan
			Peningkatan sinergitas penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan



			pembangunan daerah
	Meningkatnya Budaya Inovasi Daerah	Meningkatkan inovasi daerah	Peningkatan penciptaan, pengembangan dan kelembagaan inovasi pelayanan publik



BAB VI  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel 6 1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN) - RENSTRA	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja PD Penanggung Jawab
			Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Akhir RPJMD		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET		
3		4	5	8	7	10	9	12	11	14	13	16	15	18	19
				26.220.581.175		29.829.960.233		31.217.690.745		32.638.462.782		33.507.778.421		153.414.473.356	5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				26.220.581.175		29.829.960.233		31.217.690.745		32.638.462.782		33.507.778.421		153.414.473.356	5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	62,97 (B)	71,2 (BB)		75,3 (BB)		78 (BB)		82,2 (A)		84,2 (A)		84,2 (A)		5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				24.370.581.175		27.216.610.233		28.577.440.745		30.006.312.782		31.506.628.421		141.677.573.356	5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Nilai Lakip Perangkat Daerah	poin	77	80		80		80		81		81		81		5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Indeks RB Perangkat Daerah	poin	65	70		75		76		80		85		85		5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Indeks Perencanaan	%	91	92		93		94		95		95		95		5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	%	91	92		93		94		95		95		95		5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				17.344.336.485		18.194.066.887		19.111.563.783		20.310.306.548		21.610.622.187		96.570.895.891	5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Nilai Lakip Perangkat Daerah	poin	77	80	17.237.956.485	80	18.067.686.887	80	18.735.183.783	81	20.183.926.548	81	21.234.242.187	81	95.458.995.891	5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				288.784.942		303.224.189		318.385.399		334.304.668		351.019.902		1.595.719.100	5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	288.784.942	100	303.224.189	100	318.385.399	100	334.304.668	100	351.019.902	100	1.595.719.100	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				11.500.624.243		12.075.655.456		12.679.438.228		13.313.410.140		13.979.080.647		63.548.208.714	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	11.500.624.243	100	12.075.655.456	100	12.679.438.228	100	13.313.410.140	100	13.979.080.647	100	63.548.208.714	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				18.000.000		18.900.000		19.845.000		20.837.250		21.879.113		99.461.363	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	18.000.000	100	18.900.000	100	19.845.000	100	20.837.250	100	21.879.113	100	99.461.363	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				1.403.152.811		1.455.824.030		1.551.283.783		1.868.512.549		2.064.765.699		8.343.538.872	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	1.403.152.811	100	1.455.824.030	100	1.551.283.783	100	1.868.512.549	100	2.064.765.699	100	8.343.538.872	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				-		535.063.250		303.260.412		590.742.432		558.571.343		1.987.637.437	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	-	100	535.063.250	100	303.260.412	100	590.742.432	100	558.571.343	100	1.987.637.437	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				2.787.458.626		2.976.831.558		3.125.673.135		3.281.956.792		3.446.054.632		15.617.974.743	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2.787.458.626	100	2.976.831.558	100	3.125.673.135	100	3.281.956.792	100	3.446.054.632	100	15.617.974.743	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				1.239.935.862		702.188.405		737.297.825		774.162.717		812.870.852		4.266.455.662	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	1.239.935.862	100	702.188.405	100	737.297.825	100	774.162.717	100	812.870.852	100	4.266.455.662	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Indeks RB Perangkat Daerah	poin	65	70	106.380.000	75	126.380.000	76	376.380.000	80	126.380.000	85	376.380.000	85	1.111.900.000	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				106.380.000		126.380.000		376.380.000		126.380.000		376.380.000		1.111.900.000	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	106.380.000	100	126.380.000	100	376.380.000	100	126.380.000	100	376.380.000	100	1.111.900.000	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				3.326.244.690		3.197.812.436		3.334.246.052		3.422.475.324		4.253.475.324		17.534.253.825	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Indeks Perencanaan	%	91	92	3.326.244.690	93	3.197.812.436	94	3.334.246.052	95	3.422.475.324	95	4.253.475.324	95	17.534.253.825	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				868.130.436		868.130.436		851.024.458		1.064.253.730		1.514.253.730		5.165.792.789	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	%	100	100	868.130.436	100	868.130.436	100	851.024.458	100	1.064.253.730	100	1.514.253.730	100	5.165.792.789	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				1.719.000.000		1.650.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		8.169.000.000	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	1.719.000.000	100	1.650.000.000	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	100	8.169.000.000	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				739.114.254		679.682.000		883.221.594		758.221.594		1.139.221.594		4.199.461.036	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	739.114.254	100	679.682.000	100	883.221.594	100	758.221.594	100	1.139.221.594	100	4.199.461.036	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				3.700.000.000		3.211.380.910		3.491.380.910		3.641.380.910		3.641.380.910		17.685.523.640	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	%	91	92	3.700.000.000	93	3.211.380.910	94	3.491.380.910	95	3.641.380.910	95	3.641.380.910	95	17.685.523.640	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				1.850.000.000		1.820.000.000		1.820.000.000		1.950.000.000		1.950.000.000		9.390.000.000	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	1.850.000.000	100	1.820.000.000	100	1.820.000.000	100	1.950.000.000	100	1.950.000.000	100	9.390.000.000	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				753.365.128		743.365.128		1.023.365.128		1.043.365.128		1.043.365.128		4.606.825.640	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100	100	753.365.128	100	743.365.128	100	1.023.365.128	100	1.043.365.128	100	1.043.365.128	100	4.606.825.640	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



				1.096.634.872		648.015.782		648.015.782		648.015.782		648.015.782		3.688.698.000	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	1.096.634.872	100	648.015.782	100	648.015.782	100	648.015.782	100	648.015.782	100	3.688.698.000	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				1.850.000.000		2.613.350.000		2.640.250.000		2.632.150.000		2.001.150.000		11.736.900.000	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Indeks Inovasi Daerah	poin	340	489		490		500		510		550		550		5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				1.850.000.000		2.613.350.000		2.640.250.000		2.632.150.000		2.001.150.000		11.736.900.000	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Indeks Inovasi Daerah	Point	340	489	1.850.000.000	490	2.613.350.000	500	2.640.250.000	510	2.632.150.000	550	2.001.150.000	550	11.736.900.000	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				150.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		1.100.000.000	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	%	100	100	150.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.100.000.000	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				700.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		575.000.000		4.575.000.000	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	%	100	100	700.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	575.000.000	100	4.575.000.000	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				365.000.000		658.200.000		665.100.000		657.000.000		641.000.000		2.986.300.000	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	%	100	100	365.000.000	100	658.200.000	100	665.100.000	100	657.000.000	100	641.000.000	100	2.986.300.000	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				635.000.000		655.150.000		625.150.000		625.150.000		535.150.000		3.075.600.000	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	%	100	100	635.000.000	100	655.150.000	100	625.150.000	100	625.150.000	100	535.150.000	100	3.075.600.000	5.01.5.05.0.00.0 2.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Tabel 6 2 Program Prioritas Bappeda

ko de	Program/Kegiatan Prioritas	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Permendagri 90			Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Data Capai an Tahu n 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Pagu Indikatif 2022-2026
								2022		2023		2024		2025		2026		
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
P.P 1	Penerapan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN																	
	KP-6 25% kenaikan tunjangan kinerja daerah ASN	Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Orang Bulan	798	798	10.764.304.243	798	11.302.519.45 6	798	11.867.645.42 8	798	12.461.027.7 00	798	13.084.079.085	59.479.575.9 12
P.P 2	Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah																	
	KP-2 Peningkatan Kualitas Penerapan SAKIP	Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Perencana an, Pengangga ran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dokume n	3	2	17.496.622	2	18.371.453	3	19.290.026	2	20.254.527	3	21.267.253	96.679.881
				Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA SKPD	dokume n	4	24	158.673.730	24	166.607.417	24	174.937.787	24	183.684.677	24	192.868.911	876.772.521
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	Dokume n	0	2	14.179.000	2	14.887.950	2	15.632.348	2	16.413.965	2	17.234.663	78.347.925
					Jumlah dokumen LKIP	Dokume n	0	1	16.214.330	1	17.025.047	1	17.876.299	1	18.770.114	1	19.708.619	89.594.409
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Sektoral yang disusun	dokume n	0	4	41.110.630	4	43.166.162	4	45.324.470	4	47.590.693	4	49.970.228	227.162.182
					Jumlah Dokumen SKM yang disusun	dokume n	0	2	41.110.630	2	43.166.162	2	45.324.470	2	47.590.693	2	49.970.228	227.162.182
		Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	dokume n	3	3	13.500.000	3	14.175.000	3	14.883.750	3	15.627.938	3	16.409.334	74.596.022
	KP-4 Pengelolaan Manajemen asset	Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Administ rasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Orang Bulan	24	24	18.000.000	24	18.900.000	24	19.845.000	24	20.837.250	24	21.879.113	99.461.363
P.P 2	Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah																	
	KP-1 Satu Data Pembangunan Cilegon	Program perencanaa n, pengendalia n dan evaluasi pembangun an daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerinta han Daerah Bidang Perencana an Pembangu nan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rakor Forum data Pembangunan daerah (Prioritas Daerah)	Kegiatan	4	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	1.000.000.00 0
					Jumlah Dokumen Data Sektoral Kewilayahan	Dokume n	0	1	124.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	524.000.000
					Jumlah Dokumen Data Sektoral Perencanaan	Dokume n	0	1	145.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	545.000.000
					Jumlah Dokumen Analisis Data perencanaan Pembangunan Daerah	Dokume n	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	600.000.000
					Jumlah Dokumen Data Prioritas Pembangunan Daerah (Prioritas Daerah)	Dokume n	0	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	3.000.000.00 0



ko de	Program/Kegiatan Prioritas	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Permendagri 90			Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Data Capai an Tahu n 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Pagu Indikatif 2022-2026
								2022		2023		2024		2025		2026		
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Aplikasi Dataku Data Pembangunan yang dimutakhirkan (Prioritas Daerah)	Aplikasi	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1.000.000.000
					Jumlah bulan penyediaan Operasional Sekretariat Satu Data Kota Cilegon (Prioritas Daerah)	Bulan	0	12	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	500.000.000
					Jumlah OPD yang diberikan Bimbingan teknis Penyusunan Data perencanaan Pembangunan	OPD	0	36	100.000.000	36	100.000.000	36	100.000.000	36	100.000.000	36	100.000.000	500.000.000
		Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	500.000.000
	KP-2 Peningkatan kualitas penerapan SAKIP	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dilaksanakan	Kegiatan	3	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	1.000.000.000
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah DPWKel AWARD yang terlaksana	Kegiatan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	0	100.000.000	500.000.000
					Jumlah terlaksananya Kegiatan pemantauan yang dilaksanakan	Dokumen	0	2	100.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	480.000.000



ko de	Program/Kegiatan Prioritas	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Permendagri 90			Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Data Capai an Tahu n 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Pagu Indikatif 2022-2026
								2022		2023		2024		2025		2026		
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Koordinasi Perencana an Bidang Pemerinta han dan Pembangu nan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah DPWkel AWARD yang terlaksana	Kegiatan	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1.450.000.000
					Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis DPWkel yang tersusun	dokume n	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	250.000.000
					Jumlah Publikasi DPKWel	Kegiatan	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	250.000.000
					Jumlah Pengendalian dan Pendampingan Pelaksanaan Program DPWkel di 43 kelurahan	Bulan	0	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	250.000.000
					Jumlah dukungan Operasional sekretariat bersama pelaksanaan program DPWkel se- Kota Cilegon	Bulan	0	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	250.000.000
					Jumlah Pedoman umum DPWkel - Keputusan Walikota Pedum DPWkel	dokume n	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	250.000.000



ko de	Program/Kegiatan Prioritas	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Permendagri 90			Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Data Capai an Tahu n 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Pagu Indikatif 2022-2026
								2022		2023		2024		2025		2026		
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Pedoman umum Kecamatan dalam rangka sinergitas DPWkel	dokume n	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	250.000.000
			Koordinasi Perencana an Bidang Pemerinta han dan Pembangu nan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen yang di asistensi	Dokume n	0	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	500.000.000
			Koordinasi Perencana an Bidang Pemerinta han dan Pembangu nan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun N-1	Dokume n	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	500.000.000
			Koordinasi Perencana an Bidang Pemerinta han dan Pembangu nan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Pembangunan Manusia Sub Bidang Pembangunan Manusia	Kegiatan	4	10	250.000.000	10	240.000.000	10	240.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	1.230.000.000
					Jumlah Acuan penyusunan Rencana Kerja OPD	Dokume n	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	500.000.000
					Jumlah Fasilitas Program Lintas sektor Sub. Bidang sosial	Kegiatan	3	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	500.000.000



ko de	Program/Kegiatan Prioritas	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Permendagri 90			Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Data Capai an Tahu n 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Pagu Indikatif 2022-2026
								2022		2023		2024		2025		2026		
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Rakor Perencanaan Kegiatan Bersumber dana APBD : Kota,APBD Prov/APBN Sub. bidang sosial	Kegiatan	5	5	250.000.000	5	240.000.000	5	240.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	1.230.000.000
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangun an Daerah	Koordinasi Perencana an Bidang Perekono mian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah OPD dalam pembahasan perencanaan pembangunan	OPD	4	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	250.000.000
			Koordinasi Perencana an Bidang Perekono mian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah OPD yang diasistensi bidang perekonomian	OPD	0	4	100.000.000	0	90.000.000	4	90.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	480.000.000
			Koordinasi Perencana an Bidang Perekono mian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah OPD yang di monitoring dan evaluasi	OPD	0	4	53.365.128	4	53.365.128	4	53.365.128	4	53.365.128	4	53.365.128	266.825.640
					Jumlah OPD yang mengikuti pembahasan bahan penyusunan LKPJ, AMJ	OPD	0	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	250.000.000
			Koordinasi Perencana an Bidang Perekono mian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rapat koordinasi pembangunan	Rakor	0	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	250.000.000



ko de	Program/Kegiatan Prioritas	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Permendagri 90			Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Data Capai an Tahu n 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Pagu Indikatif 2022-2026
								2022		2023		2024		2025		2026		
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Konsultasi / Studi pengembangan pembangunan daerah	Studi	1	1	-	1	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	450.000.000
					Jumlah Konsultasi / Studi pengembangan pembangunan daerah	Studi	1	1	-	1	-	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	420.000.000
			Koordinasi Perencana an Bidang Perekono mian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen analisa perencanaan sub bidang LH SDA dan Kebencanaan	Dokume n	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	500.000.000
			Koordinasi Perencana an Bidang Perekono mian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan yang diasistensi	Dokume n	0	24	50.000.000	24	50.000.000	24	50.000.000	24	50.000.000	24	50.000.000	250.000.000
			Koordinasi Perencana an Bidang Perekono mian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokume n	0	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	750.000.000
			Koordinasi Perencana an Bidang Perekono mian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dokume n	0	4	150.000.000	10	150.000.000	10	140.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	740.000.000



ko de	Program/Kegiatan Prioritas	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Permendagri 90			Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Data Capai an Tahu n 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Pagu Indikatif 2022-2026
								2022		2023		2024		2025		2026		
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah an	5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	500.000.000
					Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan yang diasistensi	Dok	0	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	500.000.000
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah an	5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					593.996.872		145.377.782		145.377.782		145.377.782		145.377.782	1.175.508.000
					Jumlah Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi	Dok	1	1	73.918.692	1	73.918.692	1	73.918.692	1	73.918.692	1	73.918.692	369.593.460
					Jumlah DOKUMEN PERENCANAAN AIR MINUM	Dok	1	1	448.619.090	0	-	0	-	0	-	0	-	448.619.090
					Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Dok	0	1	71.459.090	0	71.459.090	1	71.459.090	0	71.459.090	0	71.459.090	357.295.450



ko de	Program/Kegiatan Prioritas	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Permendagri 90			Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Data Capai an Tahu n 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Pagu Indikatif 2022-2026
								2022		2023		2024		2025		2026		
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Koordinasi Perencana an Bidang Infrastrukt ur dan Kewilayah an	5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					402.638.000		402.638.000		402.638.000		402.638.000		402.638.000	2.013.190.00 0
					Jumlah Dokumen Updating Data Prasarana	Dok	1	1	206.664.264	1	206.664.264	1	206.664.264	1	206.664.264	1	206.664.264	1.033.321.32 0
					Jumlah OPD yang mengikuti Rapat Koordinasi,Integrasi,Sin kronisasi, dan Sinergitas SubBidang Infrastruktur dan PengembanganWilayah	OPD/Ke g	4	4	58.971.582	4	58.971.582	4	58.971.582	4	58.971.582	4	58.971.582	294.857.910
					Jumlah Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD	Dok	4	4	66.192.090	4	66.192.090	1	66.192.090	1	66.192.090	1	66.192.090	330.960.450
					Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	OPD	4	4	70.810.064	4	70.810.064	4	70.810.064	4	70.810.064	4	70.810.064	354.050.320
		Program perencanaa n, pengendalia n dan evaluasi pembangun an daerah	Penyusun an Perencana an dan Pendanaa n	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Analisa Kondisi, Permasalahan dan Isu Strategis Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun	dokume n	3	2	57.880.436	2	57.880.436	2	60.774.458	2	60.774.458	2	60.774.458	298.084.245

ko de	Program/Kegiatan Prioritas	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Permendagri 90			Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Data Capai an Tahu n 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Pagu Indikatif 2022-2026
								2022		2023		2024		2025		2026		
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Penyusun an Perencana an dan Pendanaa n	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Pusat, Provinsi dan Daerah Perubahan dan Reguler yang disusun	Dokume n	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	250.000.000
			Penyusun an Perencana an dan Pendanaa n	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Peserta Konsultasi Publik	dokume n	0	200	150.000.000	200	150.000.000	200	150.000.000	200	150.000.000	200	100.000.000	700.000.000
			Penyusun an Perencana an dan Pendanaa n	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah OPD Pelaksana Forum OPD	dokume n	0	11	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	250.000.000
			Penyusun an Perencana an dan Pendanaa n	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Musrenbang - Jumlah stakeholder yang hadir dalam Musrenbang RKPD	Undanga n	300	300	150.000.000	300	150.000.000	300	130.000.000	300	250.000.000	300	250.000.000	930.000.000
			Penyusun an Perencana an dan Pendanaa n	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah bahan musrenbang kelurahan	Dokume n	0	43	32.250.000	43	32.250.000	43	32.250.000	43	32.250.000	43	32.250.000	161.250.000
					Jumlah Pembekalan Panitia dan Fasilitator Musrenbangcam/kel	0	0	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	193.229.272	200	193.229.272	686.458.544
					Jumlah Kelurahan yang dimonitor melaksanakan Musrenbang Kelurahan	0	0	43	50.000.000	43	50.000.000	43	50.000.000	43	50.000.000	43	50.000.000	250.000.000
					Jumlah bahan musrenbang kecamatan	0	0	8	8.000.000	8	8.000.000	8	8.000.000	8	8.000.000	8	8.000.000	40.000.000
					Jumlah Kecamatan yang dimonitor melaksanakan Musrenbang Kecamatan	0	0	8	20.000.000	8	20.000.000	8	20.000.000	8	20.000.000	8	20.000.000	100.000.000
			Penyusun an Perencana an dan Pendanaa n	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun N+2	dokume n	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	250.000.000
					Jumlah Peserta Koordinasi Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Cilegon Tahun 2026 - 2031	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	200	200.000.000	200.000.000
					Jumlah Peserta Konsultasi Publik Dokumen KLHS RPJMD Tahun 2026 - 2031	Kegiatan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	200	200.000.000	200.000.000
					Jumlah Dokumen RPJMD Tahun 2026 - 2031	Kegiatan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	100.000.000
					Jumlah Dokumen RKPD Tahun N+1	dokume n	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	250.000.000
					Jumlah Dokumen Perubahan RKPD Tahun N	dokume n	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	250.000.000





ko de	Program/Kegiatan Prioritas	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Permendagri 90			Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Pagu Indikatif 2022-2026
								2022		2023		2024		2025		2026		
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Peserta Koordinasi Penyusunan Dokumen RKPD Kota Cilegon Tahun N+1	Orang	0	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	250.000.000
		Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengendalian perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan	Dokumen	2	2	72.290.254	2	71.824.000	2	71.824.000	2	71.824.000	2	71.824.000	359.586.254
					Jumlah peserta bimbingan teknis tata kelola pengendalian dan evaluasi pembangunan	Orang	100	100	227.790.000	100	227.790.000	100	227.790.000	100	227.790.000	100	207.011.594	1.118.171.594
					Jumlah pelaksanaan koordinasi pengendalian perencanaan pembangunan	Kali	0	4	- 155.966.000	4	- 155.966.000	4	- 155.966.000	4	- 155.966.000	4	190.386.000	- 433.478.000
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	Kegiatan	0	1	75.000.000	1	75.000.000	2	75.000.000	2	-	2	100.000.000	325.000.000
					Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah	dokumen	0	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	-	1	50.000.000	150.000.000
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen yang disusun (dokumen LKPJ walikota tahun n-1)	Dokumen	1	1	164.683.200	1	164.683.200	1	164.683.200	1	164.683.200	1	164.683.200	823.416.000
					Jumlah instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan	Sistem aplikasi/dokumen / SOP	1	1	108.966.000	0	-	1	94.573.594	1	94.573.594	1	-	298.113.188
					Jumlah dokumen evaluasi capaian RPJMD yang disusun	Dokumen	0	0	-	1	-	1	108.966.000	1	108.966.000	1	108.966.000	326.898.000
					Jumlah dokumen money kegiatan yang bersumber dari DAK, DID, Bankeu, Tugas Pembantuan, dsb	Dokumen	0	4	37.224.000	4	37.224.000	4	37.224.000	4	37.224.000	4	37.224.000	186.120.000
					Jumlah dokumen evaluasi kinerja SPM Kota Cilegon yang disusun	Dokumen	2	2	136.900.800	2	136.900.800	2	136.900.800	2	136.900.800	2	136.900.800	684.504.000
					Jumlah dokumen evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kota Cilegon	Dokumen	0	4	72.226.000	4	72.226.000	4	72.226.000	4	72.226.000	4	72.226.000	361.130.000



ko de	Program/Kegiatan Prioritas	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Permendagri 90			Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Data Capal an Tahu n 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Pagu Indikatif 2022-2026
								2022		2023		2024		2025		2026		
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
P.P 9	Peningkatan inovasi pendapatan daerah																	
	KP-2  Pembentukan BUMD pengelolaan limbah industri dan BUMD investasi	Program Penelitian dan Pengemban gan Daerah	Penelitian dan Pengemba ngan Bidang Ekonomi dan Pembangu nan	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha	Dokume n	1	0	-	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	0	-	360.000.000
	KP-3  Kerjasama pemerintah swasta dalam pengelolaan pasar rakyat	Program Penelitian dan Pengemban gan Daerah			Jumlah Policy Brief yang dihasilkan	Dokume n	0	0	-	1	12.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	0	-	66.000.000
	KP-4  Pembentukan unit usaha air mineral di bawah PDAM	Program Penelitian dan pengemban gan daerah																



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Bappeda Kota Cilegon yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda Kota Cilegon dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel dibawah ini :

*Tabel 7 1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	77	80	80	80	81	81	81
	Indeks RB Perangkat Daerah	65	70	75	76	80	85	85
	Indeks Perencanaan	91%	92%	93%	94%	95%	95%	95%
	Persentase Keselarasan Dokumen	91%	92%	93%	94%	95%	95%	95%
	Perencanaan Indeks Inovasi Daerah	340	489	490	500	510	550	550

Tabel 7 2 Definisi Operasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Indeks RB dinilai setiap tahun oleh KemenPAN RB dengan Komponen Pengungkit 60% dan Hasil 40%
2		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan profesionalitas aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai LAKIP Perangkat Daerah dinilai setiap tahun oleh APIP dengan Komponen Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%), dan Capaian Kinerja (20%)
3			Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dinilai setiap tahun oleh KemenPAN RB dengan Komponen Pengungkit 60% dan Hasil 40%
4			Indeks Perencanaan	%	Persentase hasil keselarasan, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan kota
5			Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	%	Persentase hasil keselarasan, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan sektoral
6		Meningkatnya Budaya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Poin	Indeks Inovasi Daerah dinilai setiap tahun oleh Kemendagri yang telah divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Cilegon untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan yang menjadi kewenangan daerah dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Bappeda Kota Cilegon.

Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Cilegon.

Permasalahan Perencanaan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Bappeda Kota Cilegon. oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan. Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan, berdaya guna dan berhasil guna. Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Bappeda Kota Cilegon. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat

diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas Perencanaan dan Kelitbangan secara optimal.

Semoga Rancangan Awal Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon.